

KOLABORASI PEMERINTAH DAN LSM DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR

Henri^{1*}

Email: henri@unm.ac.id
Universitas Negeri Makassar

Nasir²

Email: nasir@unm.ac.id
Universitas Negeri Makassar

Abstract

Fishing communities in Pangkajene and Islands Regency (Pangkep) face various structural challenges such as limited capital, low access to technology, and dependence on daily catches which have an impact on low levels of welfare. To overcome these problems, collaborative efforts are made between local governments and Non-Governmental Organizations (NGOs) in the implementation of coastal community empowerment programs. This research aims to examine the forms of collaboration between the government and NGOs and assess their contribution to empowering and improving the welfare of the fishing community. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observations, and documentation of informants from the government, NGOs, and fishermen's groups. The findings show that the collaboration has resulted in programs such as training, economic assistance, and environmental education that have a positive impact on community capacity building. However, collaboration still faces obstacles in coordination, program sustainability, and uneven community participation. This research contributes to enriching the literature on collaborative governance in the context of empowering coastal communities, as well as a reference for governments and NGOs to design collaboration strategies that are more inclusive, sustainable, and based on local needs.

Keywords: community empowerment, collaboration between government and NGOs, fishers, coastal welfare, collaborative governance

Abstrak

Komunitas nelayan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menghadapi berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan modal, rendahnya akses teknologi, dan ketergantungan pada hasil tangkapan harian yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan upaya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk kolaborasi yang terjalin antara pemerintah dan LSM serta menilai kontribusinya terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan komunitas nelayan. Pendekatan

yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari pemerintah, LSM, dan kelompok nelayan. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin telah menghasilkan program-program seperti pelatihan, pendampingan ekonomi, serta edukasi lingkungan yang cukup berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat. Namun, kolaborasi masih menghadapi kendala dalam koordinasi, keberlanjutan program, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai tata kelola kolaboratif dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir, serta menjadi acuan bagi pemerintah dan LSM untuk merancang strategi kolaborasi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, kolaborasi pemerintah dan LSM, nelayan, kesejahteraan pesisir, tata kelola kolaboratif

Submitted: 01-08-2025 | Accepted: 31-08-2025 | Published: 31-08-2025

1. Pendahuluan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) merupakan salah satu daerah pesisir di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Letak geografis yang strategis, ditambah dengan kekayaan biota laut yang melimpah, menjadikan wilayah ini sebagai pusat kegiatan ekonomi berbasis laut, khususnya perikanan tangkap dan budidaya. Sebagian besar penduduk yang bermukim di wilayah pesisir dan kepulauan menggantungkan hidupnya dari aktivitas perikanan dan kelautan sebagai sumber mata pencaharian utama. Aktivitas ini tidak hanya menopang kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya dan identitas sosial masyarakat setempat.

Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan taraf hidup komunitas nelayan secara signifikan. Komunitas nelayan di Pangkep masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan berkelanjutan. Permasalahan seperti keterbatasan modal usaha, akses terbatas terhadap teknologi perikanan modern, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi keuangan, serta ketergantungan terhadap hasil tangkapan harian membuat mereka rentan terhadap perubahan kondisi alam dan pasar. Selain itu, lemahnya posisi tawar nelayan dalam rantai distribusi hasil tangkapan juga turut memperburuk kondisi ekonomi mereka. Masalah ini semakin diperparah dengan minimnya perlindungan sosial dan terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan formal.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, upaya pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan komunitas nelayan. Pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas nelayan dalam aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Namun, keterbatasan sumber daya dan jangkauan program dari pihak pemerintah mendorong terbentuknya kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang turut memainkan peran signifikan dalam mendampingi masyarakat. Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan usaha alternatif, akses permodalan, hingga advokasi kebijakan publik yang berpihak pada nelayan kecil.

Beberapa LSM yang aktif di wilayah ini seperti Yayasan Konservasi Laut (YKL), WWF Indonesia, serta mitra lokal lainnya, telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat pesisir. Kolaborasi tersebut, secara ideal, mampu mengintegrasikan kekuatan negara dan masyarakat sipil untuk membangun komunitas yang lebih berdaya dan mandiri. Namun, dalam praktiknya, efektivitas kolaborasi ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat sejumlah tantangan seperti koordinasi yang kurang sinergis, tumpang tindih program, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kegiatan. Beberapa program yang telah dijalankan juga menunjukkan keterbatasan dalam hal keberlanjutan jangka panjang dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Situasi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pola kolaborasi antara pemerintah dan LSM dijalankan dalam konteks pemberdayaan komunitas nelayan. Penelitian ini penting untuk memahami bentuk hubungan kelembagaan, mekanisme kerja sama, serta dinamika pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, perlu juga dianalisis sejauh mana kolaborasi tersebut benar-benar mampu memberikan perubahan positif bagi kehidupan masyarakat pesisir, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk kolaborasi antara pemerintah dan LSM dalam pemberdayaan

komunitas nelayan di Kabupaten Pangkep, dan sejauh mana kolaborasi tersebut berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola kemitraan antara pemerintah dan LSM dalam pemberdayaan nelayan di Pangkep, menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kolaborasi, serta menilai kontribusi kolaborasi tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah, LSM, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang program pemberdayaan yang lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. Kajian Pustaka

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang dirancang untuk mendorong komunitas agar mampu meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian mereka dalam mengelola sumber daya serta mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri. Menurut Tesoriero (2009), pemberdayaan adalah proses sosial dan politik yang memberikan ruang bagi kelompok marginal untuk memperoleh kendali atas sumber daya dan kekuasaan melalui penguatan kapasitas individu maupun kolektif. Dalam konteks masyarakat nelayan, proses ini menjadi sangat penting, mengingat komunitas pesisir kerap mengalami ketertinggalan dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap layanan publik.

Senada dengan itu, Kartasasmita (1996) mengartikan pemberdayaan sebagai usaha membangun daya atau kekuatan masyarakat, agar mereka mampu melepaskan diri dari ketergantungan dan menciptakan peluang hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak cukup hanya dalam bentuk bantuan material, melainkan harus menyentuh aspek struktural, seperti kelembagaan, pengambilan keputusan, serta penguasaan keterampilan. Dalam proses ini, pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran penting sebagai fasilitator, pendamping, sekaligus jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan.

Pentingnya kolaborasi antaraktor dalam konteks pembangunan telah banyak dibahas

dalam literatur tata kelola publik. Bryson, Crosby, & Stone (2006) mengemukakan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan pendekatan strategis dalam mengatasi persoalan-persoalan publik yang bersifat kompleks dan tidak bisa diselesaikan oleh satu aktor tunggal. Dalam hal ini, pemerintah memiliki keunggulan dalam hal legitimasi dan regulasi, sedangkan LSM membawa kekuatan dalam hal pendekatan berbasis komunitas, kepekaan sosial, dan kedekatan emosional dengan masyarakat akar rumput.

Lebih lanjut, Ansell & Gash (2008) menjelaskan konsep *collaborative governance* sebagai bentuk tata kelola kolaboratif yang menekankan pada kemitraan antara aktor negara dan non-negara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Proses ini mencakup negosiasi, dialog, dan saling pengertian dalam kerangka kerja sama yang setara dan saling menghargai. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan dalam program pemberdayaan masyarakat nelayan, karena memungkinkan terjadinya integrasi antara kebijakan formal dan aspirasi lokal.

Dalam implementasinya, LSM terbukti memainkan peran signifikan dalam membangun kapasitas komunitas lokal, terutama di wilayah pesisir. Uphoff (1996) menyebutkan bahwa LSM bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan institusi formal, serta mampu menjembatani kesenjangan struktural melalui program pelatihan, pendidikan, dan advokasi. Pandangan ini diperkuat oleh Boediningsi & Rusmaya (2021), yang menyatakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada sejauh mana LSM dapat membangun hubungan yang partisipatif dan setara dengan komunitas.

Di sisi lain, keberhasilan kolaborasi tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip *good governance*. Menurut UNDP (1997), *good governance* ditandai oleh adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Ketika prinsip-prinsip ini dijadikan landasan dalam kerja sama antara pemerintah dan LSM, maka proses pemberdayaan masyarakat cenderung menghasilkan dampak yang lebih positif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, keberadaan struktur koordinasi yang baik antaraktor menjadi sangat penting.

Untuk memahami kompleksitas hubungan antaraktor dalam sistem pemberdayaan, teori sistem dari Parsons (2013) memberikan kerangka yang memadai. Parsons menjelaskan bahwa masyarakat terdiri atas subsistem yang saling bergantung, dan

perubahan dalam satu elemen akan memengaruhi keseluruhan sistem. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan LSM dalam program pemberdayaan harus dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang dinamis, yang menuntut harmoni, adaptasi, dan integrasi antara unsur-unsur yang terlibat.

Partisipasi masyarakat merupakan inti dari pendekatan pemberdayaan. Chambers (1995) menekankan bahwa pemberdayaan yang sejati hanya dapat tercapai bila masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap proses pembangunan mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab komunitas terhadap hasil yang dicapai.

Aspek keberlanjutan (*sustainability*) juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kolaborasi. Mikkelsen (2005) menyatakan bahwa program pemberdayaan yang baik adalah program yang dapat menciptakan kapasitas lokal yang mampu mempertahankan dan mengembangkan hasil intervensi tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak eksternal. Oleh karena itu, keberlanjutan program bukan hanya soal ketersediaan dana atau perpanjangan proyek, tetapi juga tentang transformasi sosial yang memungkinkan masyarakat untuk terus tumbuh secara mandiri.

Dengan merujuk pada konsep-konsep teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan LSM dalam pemberdayaan komunitas nelayan merupakan proses kompleks yang melibatkan aspek kelembagaan, partisipasi, tata kelola, dan pembangunan kapasitas. Kolaborasi ini akan efektif bila didasarkan pada prinsip saling percaya, pembagian peran yang jelas, serta orientasi pada keberlanjutan dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan membedah bagaimana bentuk kolaborasi tersebut berjalan, kendala yang dihadapi, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir secara nyata.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam proses kolaborasi antara pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam

pemberdayaan komunitas nelayan, serta mengeksplorasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, sebagai lokasi yang relevan mengingat wilayah ini memiliki komunitas nelayan yang besar serta aktivitas kolaboratif antara pemerintah daerah dan beberapa LSM. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan April hingga Juni 2025.

Sasaran utama penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk, proses, serta tantangan kolaborasi antara aktor-aktor tersebut dalam program pemberdayaan. Subjek penelitian terdiri atas informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu perwakilan dari pemerintah daerah (seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), perwakilan dari LSM yang aktif di bidang pemberdayaan nelayan (seperti Yayasan Konservasi Laut dan WWF Indonesia), serta anggota komunitas nelayan yang menjadi penerima manfaat program. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi program pemberdayaan.

Prosedur penelitian diawali dengan identifikasi lokasi dan pemetaan aktor yang terlibat, dilanjutkan dengan proses pengumpulan data secara bertahap. Data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memungkinkan penggalian data yang fleksibel dan mendalam. Observasi digunakan untuk memahami konteks sosial dan interaksi antaraktor selama program berlangsung. Dokumentasi meliputi kajian terhadap dokumen program, laporan kegiatan, dan arsip komunikasi antarinstansi.

Instrumen penelitian berupa panduan wawancara yang disusun berdasarkan indikator penelitian dan teori-teori yang telah dikaji pada bagian kajian pustaka, termasuk indikator kolaborasi, prinsip pemberdayaan, dan dimensi kesejahteraan masyarakat pesisir. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memperoleh data yang valid dan reliabel.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif model Miles,

Huberman, dan Saldana (2019) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola-pola dan hubungan antar tema yang ditemukan di lapangan. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta pemeriksaan keabsahan oleh informan (member check).

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian mampu menggambarkan secara utuh dan mendalam bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan LSM membentuk strategi pemberdayaan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Pangkep.

4. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Pelaksanaan kolaborasi antara pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberdayaan komunitas nelayan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menunjukkan dinamika yang kompleks dan tidak linier. Program pemberdayaan yang dijalankan melibatkan beragam pihak dengan karakteristik dan kepentingan yang berbeda, mulai dari pemerintah kabupaten yang membawa misi pembangunan daerah, LSM lokal dan internasional yang fokus pada isu keberlanjutan dan keadilan sosial, hingga komunitas nelayan sebagai penerima manfaat utama yang memiliki latar belakang sosial dan pendidikan yang beragam. Kolaborasi tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan konkret seperti pelatihan pengelolaan hasil tangkapan, pendampingan usaha berbasis kelompok, penyediaan alat tangkap ramah lingkungan, serta program edukasi tentang pelestarian ekosistem pesisir dan mitigasi perubahan iklim.

Namun demikian, pola kerja sama yang terbentuk lebih banyak berjalan dalam kerangka koordinatif sektoral daripada kolaboratif integratif. Pemerintah cenderung beroperasi dalam kerangka regulasi dan prosedur birokratis yang kaku, sedangkan LSM mengadopsi pendekatan partisipatif yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan lokal. Perbedaan ini sering kali menimbulkan ketimpangan peran dan pengaruh dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Meski demikian, terdapat sejumlah inisiatif

kolaboratif yang berhasil menjembatani pendekatan teknokratik pemerintah dengan pendekatan sosial LSM, menghasilkan program yang tidak hanya adaptif secara kebijakan, tetapi juga relevan secara sosiokultural.

Wawancara dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa kehadiran LSM memperkuat dimensi sosial dalam program pemberdayaan yang selama ini sulit dijalankan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, LSM terbukti mampu membangun kedekatan emosional dengan kelompok nelayan, menjangkau wilayah kepulauan terpencil yang sebelumnya belum terakses oleh program pemerintah, serta menciptakan rasa kepemilikan terhadap program melalui pendekatan budaya lokal. Hal ini mengafirmasi pandangan Uphoff (1996) bahwa LSM berperan strategis sebagai perantara antara masyarakat dan sistem formal, serta sebagai fasilitator dalam proses transisi dari ketergantungan menuju kemandirian.

Partisipasi aktif masyarakat terbukti menjadi indikator penting keberhasilan kolaborasi ini. Kelompok nelayan yang dilibatkan sejak tahap perencanaan menunjukkan peningkatan dalam kapasitas manajerial kelompok, keterampilan teknis, serta daya tawar ekonomi di pasar lokal. Sementara kelompok yang hanya menjadi objek penerima bantuan cenderung mengalami kesulitan mempertahankan keberlanjutan program setelah intervensi berakhir. Temuan ini menegaskan teori Chambers (1995) yang menyatakan bahwa pemberdayaan yang tidak didasarkan pada partisipasi sejati justru akan mereproduksi ketergantungan baru, bukan kemandirian.

Kolaborasi lintas sektor juga berkontribusi terhadap terbentuknya kelembagaan lokal yang mampu menjaga keberlanjutan program. Salah satu contoh konkret adalah munculnya kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas) yang dibentuk sebagai hasil sinergi antara Dinas Kelautan, LSM konservasi, dan kelompok nelayan. Pokmaswas ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga wilayah tangkap dari praktik ilegal, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan advokasi lingkungan hidup di tingkat desa. Ini memperkuat konsep collaborative governance dari Ansell & Gash (2008), yang menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi publik tergantung pada adanya kepercayaan bersama, insentif kolektif, dan pengambilan keputusan secara inklusif.

Meski demikian, berbagai hambatan masih dijumpai dalam pelaksanaan kolaborasi

ini. Tantangan utama terletak pada belum meratanya literasi kebijakan dan perencanaan di kalangan masyarakat nelayan, perbedaan tujuan antara pemerintah dan LSM, serta minimnya mekanisme evaluasi bersama. Faktor struktural lain yang berkontribusi terhadap lemahnya keberlanjutan program adalah pergantian pejabat pemerintah yang mengakibatkan disrupsi arah kebijakan, serta belum terintegrasinya program LSM ke dalam rencana pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Parsons (2013) bahwa interaksi antarelemen dalam sistem sosial harus memiliki keterkaitan yang kohesif agar tercapai kestabilan dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, sistem kolaboratif yang longgar tanpa penguatan kelembagaan rentan terhadap disintegrasi akibat dinamika internal maupun eksternal.

Penelitian sebelumnya juga mendukung pentingnya desain kolaboratif dalam praktik pemberdayaan. Boediningsi & Rusmaya (2021) menyatakan bahwa efektivitas pemberdayaan ditentukan oleh kemampuan aktor-aktor pembangunan untuk membentuk kemitraan yang berimbang, transparan, dan saling menguatkan. Sementara itu, Mikkelsen (2005) menekankan bahwa program pemberdayaan yang tidak menumbuhkan kapasitas lokal secara berkelanjutan hanya akan menghasilkan keberhasilan semu yang tidak bertahan lama. Dalam konteks Pangkep, program-program yang memberikan ruang bagi nelayan untuk mengelola kegiatan mereka sendiri cenderung lebih bertahan dan bahkan berkembang secara mandiri, dibandingkan program berbasis proyek yang berhenti setelah dana intervensi berakhir.

Secara umum, kolaborasi antara pemerintah dan LSM dalam pemberdayaan komunitas nelayan di Kabupaten Pangkep membawa dampak positif dalam peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan lokal, dan kesadaran lingkungan masyarakat pesisir. Namun demikian, efektivitas kolaborasi tersebut masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan dalam koordinasi lintas aktor, penguatan regulasi pendukung, penyelarasan tujuan antarinstansi, serta integrasi program ke dalam sistem pembangunan daerah. Penemuan ini menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif berbasis prinsip-prinsip partisipasi, inklusivitas, dan tata kelola yang baik merupakan prasyarat untuk mencapai pemberdayaan yang berkelanjutan dan bermakna.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kolaborasi antara pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberdayaan komunitas nelayan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), dapat disimpulkan bahwa bentuk kolaborasi yang terjalin menunjukkan keterlibatan yang cukup intensif dari kedua pihak, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan koordinatif. Kolaborasi ini berlangsung melalui program pelatihan, pendampingan usaha, konservasi lingkungan, hingga pembentukan kelembagaan lokal, yang secara umum memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas dan kesejahteraan komunitas nelayan. Namun, efektivitas kolaborasi tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, integrasi peran antaraktor, dan kesinambungan dukungan kebijakan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun secara partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal cenderung lebih berkelanjutan dan berdampak signifikan dibandingkan program yang bersifat top-down dan terfragmentasi.

Sebagai saran, perlu adanya penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah dan LSM melalui forum komunikasi yang rutin, transparan, dan inklusif, agar program pemberdayaan dapat lebih sinkron dan berorientasi jangka panjang. Pemerintah daerah diharapkan mengintegrasikan program LSM ke dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai upaya sinergi keberlanjutan. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan nelayan dan peningkatan literasi masyarakat tentang hak, kebijakan, dan tata kelola sumber daya pesisir menjadi kebutuhan mendesak agar kemandirian komunitas dapat terwujud secara nyata. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan studi pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mengkaji efektivitas tata kelola kolaboratif pada konteks lokal yang kompleks seperti masyarakat pesisir.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Boediningsi, W., & Rusmaya, E. (2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam

- Masyarakat Sosial. *Journal Transformation of Mandalika*, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956, 2(4), 282–291.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of Cross-Sector collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review*, 66, 44–55.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204.
- Huberman, A. (2019). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Cides.
- Mikkelsen, B. (2005). *Methods for development work and research: a new guide for practitioners*. Sage.
- Nations, D. P. U. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. UNDP.
- Parsons, T. (2013). *The social system*. Routledge.
- Tesoriero, F. (2009). *Community Development-Community Based Alternatives in an Aged of Globalisation*.
- Uphoff, N. (1996). *Learning from Gal Oya-Possibilities for participatory development and post-Newtonian social science*. SAGE Publications Sage India: New Delhi, India.